

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 2013, Presiden Tiongkok, Xi Jinping, melakukan kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan dan Indonesia, mengusulkan *Belt and Road Initiative* (BRI) untuk pertama kalinya. Xi Jinping memperkenalkan konsep ini dalam dua pidato terpisah: "*Silk Road Economic Belt*" (Sabuk Ekonomi Jalur Sutra) yang diumumkan di Kazakhstan pada September 2013, dan "*21st Century Maritime Silk Road*" (Jalur Sutra Maritim Abad ke-21) yang diumumkan di Indonesia pada bulan Oktober 2013 (Dekker, 2020). Inisiatif BRI bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kerja sama ekonomi antara negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa melalui pembangunan infrastruktur strategis, termasuk jalan raya, kereta api, pelabuhan, dan jalur energi. Sejak peluncurannya, lebih dari 150 negara dan organisasi internasional telah menandatangani perjanjian kerjasama. Kerjasama ini mencakup lebih dari enam puluh negara, yang menyumbang sekitar 65% (enam puluh lima persen) populasi dunia serta 40% dari produk domestik bruto (PDB) global (Hudson, 2020).

Dalam era globalisasi saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi elemen fundamental dalam pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan keamanan nasional. Salah satu komponen utama *Belt and Road Initiative* (BRI)

Yang menekankan aspek teknologi adalah *Digital Silk Road* (DSR). *Digital Silk Road* (DSR) resmi diluncurkan pada tahun 2015 dan diperkenalkan secara formal oleh Presiden Xi Jinping dalam Forum *Belt and Road Initiative* 2017 (Hudson, 2022; Mochinaga, 2021). DSR berfokus pada pengembangan infrastruktur digital global, termasuk jaringan komunikasi, teknologi 5G, kabel serat optik bawah laut, pusat data, kecerdasan buatan (AI), dan komputasi awan (*cloud computing*). Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat konektivitas digital Tiongkok dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa, tetapi juga meningkatkan akses Tiongkok terhadap data dan memperkuat posisinya dalam ekonomi digital global (Hu, 2024; Yayboke, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara telah menjadi kawasan yang semakin strategis dalam peta geopolitik global, dengan Tiongkok memainkan peran yang signifikan dalam membentuk arsitektur digital di wilayah ini. Salah satu instrumen utama yang digunakan Tiongkok untuk memperluas pengaruhnya di kawasan ini adalah *Digital Silk Road* (DSR) (Mochinaga, 2021; Hu, 2024). Melalui proyek-proyek besar seperti pembangunan jaringan 5G, kota pintar, serta sistem pengawasan berbasis kecerdasan buatan. Tiongkok tidak hanya menawarkan teknologi dan infrastruktur, tetapi juga berupaya menetapkan standar teknologi yang dapat memengaruhi model tata kelola negara-negara mitra (Dekker et al., 2020; Yayboke, 2020). Kehadiran perusahaan-perusahaan teknologi Tiongkok seperti Huawei, Alibaba, dan ZTE dalam proyek-proyek digital di Asia Tenggara semakin memperkuat dominasi Tiongkok di sektor ini (Hudson, 2022).

Namun, respons negara-negara Asia Tenggara terhadap inisiatif ini sangat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor domestik, ideologi politik, dan pengalaman historis masing-masing negara (Hu, 2024). Beberapa negara, seperti Laos dan Kamboja, lebih terbuka terhadap investasi dan teknologi Tiongkok, melihatnya sebagai peluang untuk mempercepat pembangunan dan mengatasi keterbatasan infrastruktur digital di negara tersebut (Mochinaga, 2021). Sebaliknya, negara-negara seperti Vietnam dan Filipina lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan potensi ancaman terhadap kedaulatan digital dan risiko pengawasan massal melalui teknologi yang dikendalikan oleh Tiongkok (LY, 2020; Hudson, 2022).

Penelitian ini membatasi ruang lingkupnya pada empat negara Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Kamboja. Keempat negara ini dipilih karena memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda dalam *Digital Silk Road*, yang mencerminkan dinamika geopolitik dan variasi kebijakan digital di kawasan ini (Dekker, 2020; Yayboke, 2020). Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki strategi tersendiri dalam menyeimbangkan kerjasama teknologi dengan Tiongkok sambil mempertahankan kedaulatan digital dan keamanan nasional (Hu, 2024). Malaysia, sebagai negara dengan pendekatan pragmatis terhadap hubungan ekonomi dengan Tiongkok, menunjukkan fleksibilitas kebijakan dalam menghadapi tantangan digitalisasi (Mochinaga, 2021). Filipina, dengan hubungan politik yang kompleks dengan Tiongkok, menunjukkan sikap yang lebih skeptis terhadap proyek DSR, sedangkan Kamboja,

sebagai mitra strategis Tiongkok, lebih terbuka dalam menerima investasi digital dari Tiongkok tanpa banyak hambatan politik (LY, 2020).

Meskipun DSR menawarkan manfaat ekonomi dan teknologi bagi negara-negara mitra, inisiatif ini juga memunculkan kekhawatiran yang serius terkait ancaman geopolitik. Tiongkok menggunakan DSR sebagai alat untuk memperkuat pengaruh politik dan ekonomi dengan mengintegrasikan teknologi 5G, kecerdasan buatan, serta analitik data ke dalam berbagai sektor strategis negara-negara mitra (Hu, 2024; Yayboke, 2020). Infrastruktur digital yang dibangun oleh Tiongkok dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara dan meningkatkan ketergantungan negara-negara mitra pada teknologi Tiongkok (Hudson, 2022). Dalam jangka panjang, ini dapat menimbulkan risiko dalam hal keamanan nasional dan kebijakan luar negeri, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Tiongkok dan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat (LY, 2020).

Penelitian ini menjadi sangat relevan dalam mengidentifikasi dinamika hubungan geopolitik di Asia Tenggara, serta menganalisis bagaimana negara-negara di kawasan ini merespons dominasi teknologi Tiongkok melalui *Digital Silk Road*. Dengan meningkatnya persaingan antara Tiongkok dan negara-negara Barat Studi ini tidak hanya penting dalam konteks teknologi, tetapi juga dalam aspek kebijakan luar negeri, keamanan digital, dan strategi diplomatik negara-negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi negara-negara di kawasan dalam menghadapi tantangan digitalisasi yang semakin kompleks.

1.2. Rumusan Masalah

Negara-negara di Asia Tenggara kini menghadapi tantangan untuk menjaga kedaulatan digital di tengah meningkatnya pengaruh Tiongkok. Infrastruktur digital yang dibangun oleh perusahaan teknologi Tiongkok, seperti Huawei, Alibaba dan ZTE, telah memicu kekhawatiran tentang potensi pengawasan, manipulasi data, dan serangan siber yang dapat mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional di kawasan ini (Yayboke, 2020). Ketergantungan pada teknologi Tiongkok berpotensi menambah kerentanan terhadap ancaman keamanan sekaligus mengubah dinamika kekuatan geopolitik di Asia Tenggara (Hu, 2024; Hudson, 2022). Langkah ini tidak hanya mendukung ekspansi komersial, tetapi juga memperluas pengaruh politik Tiongkok dengan mengontrol aliran data penting dan mengembangkan standar digital baru di kawasan Asia Tenggara (Dekker et al., 2020). Ekspansi DSR di Asia Tenggara memberikan kesempatan bagi Tiongkok untuk menyebarkan model tata kelola yang lebih tertutup. Hal ini memunculkan risiko geopolitik, di mana negara-negara di Asia Tenggara harus memilih antara biaya rendah dari teknologi Tiongkok atau risiko terhadap ancaman keamanan kedaulatan digital (Mochinaga, 2021; Szeman, 2023).

Selain itu, negara-negara di Asia Tenggara, yang seringkali memiliki kapasitas teknologi yang terbatas, berisiko menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi dan infrastruktur digital yang disediakan oleh Tiongkok, dimana negara-negara di Asia Tenggara cukup sulit untuk beralih ke pesaing selain Tiongkok ataupun mengembangkan teknologi sendiri, sehingga ini menjadi

salah salah satu isu utama yang seringkali menimbulkan ancaman serius (Hu, 2024; Yayboke, 2020).

Fenomena ini semakin nyata dengan meningkatnya jumlah proyek infrastruktur digital yang didanai oleh Tiongkok di Asia Tenggara melalui *Digital Silk Road* (DSR) (Hudson, 2022; Mochinaga, 2021). Misalnya, Huawei telah menjadipemasok utama jaringan 5G di Malaysia dan Filipina, sementara Kamboja semakin bergantung pada teknologi Tiongkok untuk mengembangkan pusat data dan sistem pengawasan nasionalnya (Dekker et al., 2020; LY, 2020). Di Indonesia, Alibaba *Cloud* dan Tencent telah memperluas cakupan layanan komputasi *cloud*, yang semakin mengikat ekosistem digital dengan standar teknologi Tiongkok (Rakhmat, 2022; Hirawan et al., 2023). Meskipun investasi ini memberikan manfaat dalam hal modernisasi infrastruktur, banyak pihak yang mengkhawatirkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan data, potensi intervensi politik, serta resiko keamanan siber yang sulit dikendalikan oleh negara penerima (He, 2024; Szeman, 2023). Selain itu, tidak semua negara memiliki kapasitas untuk mengurangi ketergantungan mereka, karena infrastruktur digital Tiongkok menawarkan biaya lebih murah dibandingkan alternatif dari negara-negara Barat, sehingga mempersempit pilihan bagi negara-negara di kawasan untuk mengadopsi teknologi lain (Mochinaga, 2021; Guo, 2022). Ketidakseimbangan dalam akses dan regulasi ini akhirnya menciptakan kerentanan geopolitik baru di Asia Tenggara dimana beberapa negara mungkin menjadi lebih terikat dengan Tiongkok, sementara yang lain berusaha mencari

jalan keluar dari ketergantungan ini demi mempertahankan kedaulatan digital (Hu, 2024; Kliman, 2019).

GAP yang ada di sini memperlihatkan adanya fenomena baru yang akan diteliti dalam penelitian ini, yakni bagaimana negara-negara Asia Tenggara menanggapi peran Tiongkok dalam membawa teknologi digital yang berpotensi mengubah dinamika geopolitik kawasan. Penelitian ini mengkaji perbedaan antara harapan terhadap manfaat ekonomi dan modernisasi infrastruktur digital dari DSR dan kenyataan akan risiko-risiko seperti ketergantungan teknologi, pengawasan data, serta ketidakseimbangan kekuatan. Penekanan diberikan pada bagaimana respon negara-negara di kawasan yang tidak seragam mencerminkan keragaman kepentingan nasional, kapasitas digital, dan strategi mempertahankan kedaulatan digital masing-masing negara. Dalam konteks hubungan internasional, ketergantungan ini dapat dilihat sebagai bentuk intervensi non-konvensional yang berpotensi memengaruhi kebijakan keamanan digital dan strategi pertahanan nasional (Hu, 2024; Yayboke, 2020). Infrastruktur digital yang dibangun dalam kerangka *Digital Silk Road* dapat menjadi sasaran empuk bagi berbagai jenis serangan. Kerentanan ini membuka peluang bagi penyalahgunaan data, pengawasan oleh negara asing, dan ketergantungan strategis yang dapat membahayakan kedaulatan digital dan keamanan nasional negara-negara di kawasan (He, 2024; Hudson, 2022). Selain itu, peralatan jaringan yang disediakan oleh Tiongkok, seperti *router* dan *switch*, dapat mengandung “*backdoor*” yang memungkinkan akses tidak sah oleh pihak ketiga (Szeman, 2023; Kliman, 2019).

Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap *Digital Silk Road* (DSR) sebagai bagian dari inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) yang dipelopori oleh Tiongkok, dengan menyoroti respons negara-negara Asia Tenggara terhadap ancaman kedaulatan digital yang ditimbulkan oleh inisiatif ini (Dekker et al., 2020; Yayboke, 2020). Pembatasan waktu dalam penelitian ini mencakup periode sejak peluncuran resmi DSR pada tahun 2015 hingga perkembangan terbaru pada tahun 2024. Rentang waktu ini dipilih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang implementasi awal hingga dampak terbaru dari DSR di kawasan Asia Tenggara.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan di atas, penelitian ini berusaha menjawab tiga pertanyaan berikut.

- a. Bagaimana *Digital Silk Road* (DSR) digunakan sebagai alat ekspansi geopolitik Tiongkok untuk mewujudkan hegemoni digital di Asia Tenggara?
- b. Bagaimana pengaruhnya terhadap kedaulatan digital negara-negara mitra seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Kamboja?
- c. Bagaimana negara-negara mitra *Digital Silk Road* (DSR) Tiongkok di Asia Tenggara berupaya mengurangi ketergantungan digital negaranya terhadap infrastruktur dan teknologi Tiongkok, dan menjaga keamanan nasional maupun kedaulatan digital masing-masing negara?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan *Digital Silk Road* (DSR) sebagai instrumen geopolitik Tiongkok yang berpotensi mengancam kedaulatan digital dan keamanan nasional negara-negara mitra di Asia Tenggara.

Dalam kerangka pendekatan Neo-Marxis, penelitian ini menggabungkan teori Dependency dan teori Hegemoni Gramsci untuk menganalisis dominasi Tiongkok melalui proyek *Digital Silk Road* (DSR). Kajian ini tidak hanya memfokuskan diri pada bagaimana DSR digunakan Tiongkok untuk membangun dominasi struktural digital yang menciptakan ketergantungan dan melemahkan posisi tawar negara-negara mitra, tetapi juga bagaimana dominasi tersebut diterima secara sukarela sebagai bentuk kepemimpinan ideologis yang terlihat menguntungkan. Dengan demikian, ketergantungan terhadap teknologi dan jaringan digital Tiongkok tidak hanya menciptakan risiko teknis, tetapi juga membentuk konsensus hegemonik yang berdampak pada stabilitas politik dan keamanan kawasan di tengah persaingan kekuatan besar.

Penelitian ini juga akan mengkaji dampak langsung dan jangka panjang dari *Digital Silk Road* (DSR) terhadap keamanan digital dan stabilitas geopolitik di Asia Tenggara. Seiring dengan semakin berkembangnya jaringan infrastruktur digital yang melibatkan teknologi Tiongkok, negara-negara di kawasan ini semakin terhubung dan bergantung pada infrastruktur digital Tiongkok, baik dalam aspek teknologi komunikasi, transportasi, hingga sektor finansial. Ketergantungan ini, meskipun membawa peluang bagi percepatan pembangunan, juga menyisakan potensi risiko besar bagi stabilitas nasional dan kawasan secara keseluruhan, khususnya dalam hal ancaman keamanan siber (Szeman, 2023).

Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara dalam melindungi keamanan nasional

mereka di tengah ekspansi DSR. Fokus utama adalah respons dari negara Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Kamboja terhadap ketergantungan pada teknologi Tiongkok serta langkah-langkah yang diambil untuk menjaga kedaulatan digital masing-masing negara. Analisis akan mencakup kebijakan nasional terkait keamanan siber, infrastruktur teknologi, serta regulasi data dan komunikasi.

1.4. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memahami perubahan dinamika geopolitik yang dipicu oleh dominasi teknologi digital di kawasan Asia Tenggara. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur hubungan internasional dengan menunjukkan pada bagaimana alat ekonomi dan teknologi digunakan sebagai instrumen dominasi struktural oleh kekuatan besar. Penelitian ini menyoroti bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak hanya datang dari aspek militer, tetapi juga dari ekspansi non-militer seperti ketergantungan teknologi dan kontrol atas infrastruktur digital strategis.

Penelitian ini juga menawarkan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat nasional maupun regional. Negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi dilema antara memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh DSR untuk pembangunan infrastruktur digital dan menjaga kedaulatan digital dari pengaruh eksternal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih adaptif dalam menghadapi tantangan geopolitik di era digital, termasuk mendorong kerja sama regional yang lebih kuat

guna menjaga stabilitas kawasan dan mengurangi ketergantungan pada teknologi Tiongkok.

Selain itu, penelitian ini tidak hanya relevan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara tetapi juga memiliki implikasi global. Inisiatif seperti *Digital Silk Road* (DSR) menunjukkan bagaimana kekuatan besar dapat menggunakan teknologi dan kontrol atas data sebagai alat untuk membentuk tatanan dunia baru. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan penting untuk memahami dinamika kekuasaan di era modern, di mana dominasi tidak lagi ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan infrastruktur digital dan arus informasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi ke dalam lima bab utama untuk memberikan struktur yang sistematis dalam pembahasan topik. **Bab 1 Pendahuluan** membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, dan sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan urgensi dan relevansi topik yang diangkat serta kerangka pertanyaan penelitian yang menjadi dasar penyusunan tesis.

Bab 2 Tinjauan Pustaka mengulas literatur terdahulu dan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian. Bab ini membahas konsep *Digital Silk Road*, ketergantungan digital, dan hegemoni teknologi dengan pendekatan teori ketergantungan Marxis.

Bab 3 Metodologi Penelitian menjelaskan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus komparatif yang digunakan untuk menganalisis bagaimana

negara-negara Asia Tenggara merespons DSR. Teknik pengumpulan dan analisis data juga dipaparkan secara rinci dalam bab ini.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan menyajikan hasil penelitian berdasarkan studi kasus di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Kamboja. Bab ini memaparkan ekspansi DSR, dampaknya terhadap kedaulatan digital, serta strategi negara-negara tersebut dalam mengurangi ketergantungan pada Tiongkok.

Bab 5 Penutup berisi kesimpulan dari temuan utama penelitian dan rekomendasi strategis untuk negara-negara Asia Tenggara dalam mengelola ketergantungan digital dan mempertahankan kedaulatan digitalnya di tengah persaingan kekuatan besar.

